

BAB V

KESIMPULAN

Sebagai pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1945, Undang-undang nomor 22 tahun 1948, dan Undang-undang 1 tahun 1957 berkaitan dengan desentralisasi di Palembang. Akibatnya, berdasarkan undang-undang tersebut di Palembang dilaksanakan. Namun untuk pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 1948 di Palembang tidak dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini dikarenakan situasi politik yang ada di Palembang tidak kondusif untuk pelaksanaannya. Secara politik Palembang sedang mengalami pembentukan sebuah negara berbentuk federal.

Sistem ini dibuat oleh Belanda yang sedang berusaha untuk kembali memerintah di wilayah Indonesia secara umum, dan di wilayah Palembang khususnya. Setelah tahun 1949, situasi politik di Palembang aman dan pembentukan negara federal dihapuskan dan kembali kepada bentuk negara kesatuan. Palembang berusaha untuk menjalankan isi dari Undang-Undang nomor 22 tahun 1948. Kondisi pemerintahan di tingkat nasional mengalami pergantian dari sistem demokrasi presidensial menjadi demokrasi parlementer yang ditandai dengan munculnya berbagai partai politik yang jumlahnya sangat banyak.

Pada masa ini pergantian kabinet dilatar belakangi oleh perbedaan ideologi yang tajam di antara partai-partai yang ada. Perbedaan ini menyebabkan program-program kabinet tidak dapat diselesaikan. Asas pokok dari pemerintahan daerah yang merupakan pelimpahan wewenang oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah terdapat beberapa hal berkaitan dengan wewenang kepada daerah. Hal tersebut tidak berjalan dengan semestinya karena pemerintah pusat tidak sepenuhnya memberikan kepada daerah untuk mengaturnya. pemerintah daerah hanya membantu atau hanya menjalankan peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Di sini asas desentralisasi tidak berfungsi dengan semestinya, karena seharusnya pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengatur daerahnya, dan bukan pemerintah pusat yang harus mengatur hal-hal sehubungan dengan kepentingan daerah. Pada kurun waktu antara tahun 1956 sampai dengan tahun 1957 timbul berbagai pergolakan di daerah-daerah yang menginginkan agar pemerintah pusat lebih memperhatikan daerah diluar Pulau Jawa. Daerah melihat bahwa pemerintah lebih cenderung memperhatikan pembangunan yang ada di Pulau Jawa, padahal daerah di luar Jawa yang telah banyak memberikan masukan dana kepada kas negara, untuk pembangunan wilayahnya berada dalam kondisi yang jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan yang ada di Jawa.

Pergolakan daerah yang diikuti oleh kelompok militer dikarenakan juga bahwa pemerintah tidak memperhatikan kondisi fasilitas yang berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Untuk itu, kelompok militer yang mendapatkan dukungan dari kelompok sipil melakukan tindakan agar pemerintah di pusat lebih memperhatikan kondisi –kondisi yang ada di luar Pulau Jawa.